

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA BANUA LAWAS KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG

Siti Rahimah¹, Saidah Hasbiyah², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: srahimah1702@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan bersifat kebendaan dimana besarnya ditentukan atas tanah dan atau bangunan. Di Desa Banua Lawas Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih rendah. mengungkapkan sejumlah masalah atau fenomena-fenomena, antara lain: kurangnya informasi kepada masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi, tidak ada sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak membayar pajak, sikap petugas masih belum optimal tidak adanya metode jemput bola dalam melakukan pemungutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembayarannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif khususnya deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 10 informan yang dipilih secara *purposive sampling* untuk menjadi sumber data setelah pengumpulan data, data dianalisis menggunakan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak di Desa Banua Lawas masih kurang baik dapat dilihat dari: *pertama*, mendapatkan informasi yang kurang karena sosialisasi yang tidak tepat. *Kedua*, sikap kurang baik karena kesadaran masyarakat kurang. *Ketiga*, tingkat ekonomi masih kurang penghasilan kunci rasa masyarakat ingin berpartisipasi. *Keempat*, interaksi dan komunikasi juga kurang baik tidak ada petugas pemungutan langsung. *Kelima*, persepsi terhadap program juga masih kurang baik masyarakat berpersepsi pajak tidak terlalu penting. *Keenam*, inisiatif dari masyarakat juga kurang baik hanya 22% masyarakat yang membayar. Adapun yang cukup baik yaitu kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dari instansi terkait yang membagikan SPPT ke rumah-rumah. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Faktor pendukung: kesempatan yang diberikan. Faktor penghambat: kurangnya sosialisasi, tingkat ekonomi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat. Saran kepada Badan pendapatan daerah kabupaten tabalong untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan mengundang wajib pajak dan memberikan informasi melalui berbagai bentuk seperti spanduk, TV, media sosial dan lain-lain. Untuk Kepala Desa serta Aparat Desa agar melakukan pemberitahuan ke masyarakat pentingnya membayar pajak dan menyediakan layanan pemungutan langsung ke rumah-rumah. Kepada masyarakat agar lebih membuka wawasan tentang penting membayar pajak bumi dan bangunan

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, PBB-P2, Desa Banua Lawas

ABSTRACT

Land and Building Tax is a tax imposed on property ownership, the amount of which is determined by the land and/or building. In Banua Lawas Village, District District found a number of problems or phenomena, including: Lack of information to the community in the form of counseling or socialization, no strict sanctions against people who do not pay taxes, the attitude of officers in serving taxpayers is not optimal, there is no socialization method in the collection of taxes. The goal of this research is to identify the variables that affect community involvement in land and building tax payments, both in rural and urban settings. With a qualitative descriptive design, this study employs a qualitative technique. Data is gathered by observation, documentation, and interviews. Purposive sampling was used to choose ten informants as data sources. Following data gathering, the information was examined utilizing techniques like data presentation, data condensation, and conclusion drafting. According to the study's conclusions, the community does not participate in paying land and building taxes. as evidenced by: First, lack of information due to inappropriate socialization. Second, poor attitudes due to lack of public awareness. Third, the economic level is also still lacking, income is the key to people's desire to participate. Fourth, interaction and communication are also lacking, there are no direct tax officers. Fifth, the perception of the program is

also not good, the community considers taxes not very important. Sixth, the initiative from the community is also not good, only 22% pay. What is quite good is the opportunity to participate from the relevant agency that distributes SPPT to homes. Factors that influence community participation, Inhibiting factors: lack of information, community economic level, lack of community awareness. Driving factors: Opportunities given. Suggestions To the Tabalong Regency Regional Revenue Agency to increase socialization activities by inviting taxpayers and providing information through various forms such as banners, TV, social media and others. To the Village Head and Village Apparatus to socialize to their communities about the importance of paying taxes and provide direct collection services to homes. To the community to be more open about the importance of paying taxes so that they care more about land and building taxes.

Keywords: *Community Participation, PBB-P2, Banua Lawas Village*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi ketergantungan pada negara lain dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan manusianya. Dalam rangka pembangunan daerah, Indonesia memerlukan dana dalam jumlah besar dari sumber dalam negeri untuk pembangunan daerah. Pembangunan dilakukan di berbagai bidang untuk mewujudkan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pajak merupakan dana utama bagi pembangunan yang di lakukan di berbagai bidang

Di Indonesia, praktek pemungutan pajak telah berlangsung sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara, di mana upeti menjadi salah satu cara kerajaan mengumpulkan uang untuk membela rakyatnya, pemungutan pajak telah menjadi praktik berkelanjutan di Indonesia. Pada masa kolonial, Pemerintah kolonial mengenakan berbagai tarif pajak sesuai dengan status kewarganegaraan pada masa itu. Pemungutan pajak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar (sebagaimana diamandemen) setelah kemerdekaan Indonesia, yang menyatakan bahwa "pajak dan pungutan wajib lainnya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Setiap warga negara berhak atas hak-hak dalam kehidupan bernegara yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan. Namun, kewajiban warga negara mempunyai landasan hukum yang jelas selain hak-haknya yang diatur, keseimbangan antar hak dan kewajiban perlu dijaga dengan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang demi terciptanya keadilan

Di Indonesia, hak dan kewajiban negara diatur oleh konstitusi, undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Karena membayar pajak secara tidak langsung memajukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, hal ini merupakan bentuk nyata dari pertahanan negara. Konflik bersenjata hanyalah salah satu cara untuk mencapai pertahanan negara; cara lain mencakup berbagai bentuk pengabdian, seperti membayar pajak.

Pajak mendukung pembangunan dan memberikan uang kepada pemerintah untuk pengeluaran rutin karena pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan. Oleh karena itu, inisiatif untuk meningkatkan penerimaan pajak negara menjadi sangat penting, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencapai pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan di berbagai sektor merupakan tujuan utama perpajakan. Hal ini sejalan dengan asas pemungutan pajak yang berkeadilan. Menurut Prof. Dr. Rochman Soemitro, S.H dikutip dari Sihombing & Sibagariang (2020:1), Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dikutip dari Sihombing & Sibagariang (2020:1), Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Sommerfelf Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R. dikutip dari Sihombing & Sibagariang (2020:2), Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keberadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan bumi tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang wajib dibayarkan oleh warga negara. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun hampir seluruh penerimanya diserahkan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam proses Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), petugas dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah turun langsung ke setiap kecamatan. Selanjutnya, pihak kecamatan mendistribusikan SPPT ke desa-desa di kecamatan Banua Lawas. Setelah SPPT sampai di kantor desa, kepala desa bertugas mengangantarnya ke setiap RT, yang kemudian ketua RT yang membagikannya kepada wajib pajak di masing-masing rumah

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di kantor desa atau melalui kantor pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Namun, tunggakan pajak yang dibiarkan bertahun-tahun dapat berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam proses pemungutan pajak, pemerintah daerah mengharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Di Desa Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 33.643.344,- tetapi realisasi yang didapat hanya Rp. 7.297.424,- atau 22%, dan masih memiliki sisa yang belum terealisasi sebesar Rp. 26.345.920,-. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan berdasarkan observasi awal peneliti, yaitu: Kurangnya informasi kepada masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang manfaat dan tujuan dari membayar pajak bumi dan bangunan sehingga wajib pajak masih kekurangan informasi dan tidak paham akan pentingnya membayar pajak, Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak sehingga wajib pajak kurang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, Sikap petugas pemberitahuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)

masih belum optimal tidak adanya metode jemput bola dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Di Desa Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dan faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian terdahulu Malinda Malini (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Desa Paliat, Desa Takulat dan Kelurahan Pulau)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dalam pembayaran PBB-P2, masyarakat belum mengetahui teknologi yang bisa digunakan selain Bank Kalsel dan Kantor Pos, belum adanya pengembangan kepemimpinan, tidak adanya sanksi tegas bagi yang tidak membayar PBB, acuh dan tidak suka respon dari masyarakat terhadap petugas pajak dan Pemerintah, kurangnya sosialisasi yang didapat, kurangnya kebersamaan masyarakat, kurangnya kemandirian

masyarakat serta masyarakat merasa kurang puas terhadap petugas PBB dalam memecahkan masalah terkait PBB. Selanjutnya Selvia (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Kota Raden Hulu dan Desa palampitan Hulu)”. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikatakan kurang baik dapat di lihat dari : pertama, kurangnya keaktifan masyarakat dalam mencari informasi terkait pembayaran PBB-P2. Kedua, kurangnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan yang dilakukan BAPENDA kepada masyarakat.

Istilah “partisipasi” adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam suatu kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan, serta ikut bertanggung jawab terhadap usaha. Menurut Bornby (1974) dikutip dari Theresia, dkk (2015:196) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Menurut Beal (1964) dikutip dari Theresia, dkk (2015:196) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen.

Menurut Verhangen (1979) dikutip dari Theresia, dkk (2015:197) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Partisipasi masyarakat menurut Jean, dkk (2007) dikutip dari Nur, dkk (2023:11), merupakan suatu perilaku prososial. Sebuah perilaku memberi manfaat kepada warga lain, yang terkait dengan eksistensi dirinya di masyarakat. Apabila seseorang tidak mendapat perlakuan baik di masyarakat, maka akan mengurangi eksistensi dirinya dan dapat mengurangi keinginan untuk berperilaku prososial.

Partisipasi masyarakat perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, seperti dikemukakan Suparjan dan Suyatno (2003) dikutip dari Nur, dkk (2023:12), bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu: Pertama, identifikasi permasalahan, di mana masyarakat bersama perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, identifikasi peluang, potensi dan hambatan. Kedua, proses

perencanaan, di mana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi. Ketiga, pelaksanaan proyek pembangunan. Keempat, evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (kemanfaatan bagi masyarakat) atautah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan. Kelima, mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan. Keenam monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan.

Menurut Henry Sanoff (2000) dikutip dari Nur, dkk (2023:12), mengemukakan tujuan partisipasi masyarakat sebagai suatu forum kerja sama dan komunikasi dari organisasi sosial ekonomi di masyarakat agar mereka dapat mandiri memenuhi kebutuhannya, membantu warga masyarakat miskin, serta media informasi kemajuan sosial dari ekonomi, sehingga semua warga mendapat kesempatan terlibat dalam proses pembangunan

METODE

Penelitian ini penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, karena memberikan gambaran secara umum mengenai objek yang sebenarnya atau realita yang terjadi dilapangan, tipe penelitian deskriptif kualitatif deskriptif memberikan gambaran umum atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan penelitian deskriptif dari individu yang diamati melalui bahasa tertulis atau lisan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan yang telah di tentukan dengan pengambilan metode *Purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari informan yang dipilih secara selektif. Informan tersebut adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai konteks dan kondisi yang menjadi fokus penelitian. Mereka adalah pihak yang paling memahami permasalahan yang sedang diteliti

Peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian.

Menurut Nasution dikutip dari Sugiyono (2021:490) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan disaring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan.

Menurut Muhammad Ali dikutip dari Sanggara (2015:113) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan, baik secara langsung, maupun tidak langsung

dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Menurut Sedarmayanti dikutip dari Sanggara (2015:121) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Menurut Miles, Huberman and Saldana (2014) dikutip dari Fiantika, dkk (2022:70-74) ada tiga aliran aktivitas parallel analisis data yaitu:

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian dan/atau transformasi data yang tampak pada seluruh korpus (tubuh) catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kompresi untuk membuat data lebih dapat diandalkan.

2. Tampilan data (*data display*)

Tampilan Data merupakan sekumpulan informasi yang terstruktur dan ringkas dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik. Dalam kehidupan sehari-hari, tampilan berkisar dari pengukur gas hingga koran dan pembaruan status Facebook. Mengamati tampilan akan membantu peneliti memahami kemajuan dan mengambil analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman itu.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

menetapkan dan memvalidasi kesimpulan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif menafsirkan makna melalui pola, kualitas penjelasan dan asumsi untuk menafsirkan makna sejak awal. Meskipun peneliti yang terampil mendekati kesimpulan ini dengan hati-hati, tetap terbuka dan skeptis, kesimpulan awalnya tetap ambigu sebelum menjadi lebih jelas dan logis.

Menurut Sugiyono (2021;562-570) menyatakan bahwa untuk uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian
3. Triangulasi
4. Diskusi Dengan Teman Sejawat
5. Analisis Kasus Negatif
6. *Membercheck*

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

Menurut Santoso (1998) dikutip dari Nur, dkk (2023:11), “partisipasi adalah proses saling tukar keputusan yang berdampak pada kehidupan seseorang dan kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya. Partisipasi adalah ke ikut sertaan, keterlibatan dan peran serta seseorang baik sebagai individu maupun sebagai kelompok di dalam suatu kegiatan tertentu.” Penelitian ini dijelaskan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Slamet (1985) dikutip dari Theresia, dkk (2015:207-211) yang membagi Partisipasi Masyarakat menjadi 3 unsur yaitu:

1. Kesempatan

Adanya kesempatan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi. Kenyataannya banyak program pembangunan yang kurang melibatkan masyarakat karena tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk melakukannya. Selain itu, masyarakat sering kali dianggap kurang mendapat informasi tentang kapan dan bagaimana mereka diharapkan untuk terlibat. Adapun indikator dari kesempatan disini mencakup kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi.

a. Kesempatan untuk berpartisipasi

Kenyataannya, kesempatan yang berfokus pada masyarakat masih kurang dalam banyak program, terutama program pembangunan. Selain itu, masyarakat sering merasa bahwa mereka tidak diberi informasi kapan dan dalam bentuk apa mereka dituntut untuk berpartisipasi.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kesempatan yang di berikan oleh instansi cukup baik sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan membagikan SPPT ke rumah-rumah namun masih banyak juga masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi karena tidak adanya petugas pemungutan langsung ke rumah-rumah yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi.

b. Mendapatkan informasi

Partisipasi memberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi, yang penting bagi inisiatif yang berfokus pada masyarakat seperti pajak bumi dan bangunan. Pemerintah desa dan instansi terkait harus memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk menjelaskan cara penerapannya.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan masih kurang baik karena sosialisasi yang dilakukan masih belum tepat sasaran hanya di lakukan per kecamatan saja yang di hadiri oleh kepala desa dan pemerintahan desa yang mengakibatkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2. Kemampuan

Perlu disadari bahwa keterlibatan masyarakat tidak akan berarti banyak jika masyarakat tidak memiliki kesempatan atau sarana untuk berpartisipasi. Peluang keterlibatan masyarakat tidak akan berarti jika masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. kesempatan untuk mengidentifikasi dan memahami peluang partisipasi atau peningkatan kualitas hidup seseorang, serta kemampuan untuk melaksanakan kegiatan yang terhambat oleh ekonomi.

Adapun indikator dari Kemampuan disini adalah persepsi terhadap program dan tingkat ekonomi masyarakat.

a. persepsi terhadap program

Persepsi adalah pendapat atau reaksi terhadap sesuatu, kejadian, atau koneksi yang diperoleh dari pengumpulan dan analisis data.

Dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat kurang baik karena masih banyak masyarakat yang beranggapan pajak ini tidak terlalu penting dan tidak menyadari pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga mereka menganggap sebelah mata/sepele.

b. Tingkat ekonomi masyarakat

Membayar pajak kepada pemerintah merupakan salah satu cara warga negara dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Para wajib pajak yang membayar pajak diharuskan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya. Keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit untuk terlibat, yang pada akhirnya membatasi kemampuan untuk melaksanakan kemajuan.

Dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih rendah mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Bania Lawas sebagai petani yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak masih rendah.

3. Kemauan

Kemauan untuk berpartisipasi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh sikap mental masyarakat dalam upaya membangun serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara psikologis, dorongan untuk berpartisipasi dapat muncul dari motivasi internal maupun rangsangan, dorongan, atau tekanan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar.

a. Sikap

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program tentu saja dipengaruhi oleh adanya kemauan yang muncul dari sikap masyarakat itu sendiri dalam menyikapi program tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap masyarakat masih kurang baik karena sikap mental masyarakat sulit diubah karena kebanyakan menganggap pajak tidak terlalu penting namun juga seharusnya petugas pemungutan datang langsung ke rumah-rumah serta dibarengi dengan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan pola pikir yang selalu ingin terus menurus berusaha meningkatkan kualitas hidup.

b. Inisiatif

Proses penerapan suatu kebijakan atau program akan dipengaruhi oleh adanya kemauan yang terwujud sebagai inisiatif masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa inisiatif dari masyarakat masih kurang baik hanya 22% masyarakat yang membayar pajak karena di Desa Bania Lawas tingkat pendidikan masih rendah sehingga kurang mengetahui tentang pentingnya membayar pajak.

c. Interaksi dan Komunikasi

Interaksi dan komunikasi dengan pemerintah atau mereka yang pelaksana pembangunan sangat penting karena mereka niscaya memengaruhi kemauan masyarakat untuk terlibat.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa interaksi dan komunikasi masih kurang baik karena tidak adanya pemungutan langsung ke rumah-

rumah serta komunikasi yang kurang sehingga mengakibatkan masyarakat tidak paham mengenai pajak bumi dan bangunan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

Banyak faktor atau variable yang dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan, setiap program pembangunan akan mencapai hasil yang optimal apabila ada dukungan atau kontribusi untuk masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan dari program perlu adanya partisipasi itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak Di Desa Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong yaitu:

1. Faktor penghambat

a. Kurangnya sosialisasi

Dari hasil wawancara dan observasi faktor penyebab masih kurangnya mendapatkan informasi yaitu karena sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah masih tidak tepat sasaran hanya tertuju kepada kecamatan dan pemerintan desa saja tidak ke wajib pajaknya langsung serta tidak ada pemberian informasi berupa spanduk dikantor desa sehingga masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan

b. Tingkat ekonomi masyarakat

Dari hasil wawancara dan observasi penyebab kurangnya kemampuan masyarakat membayar yaitu karena masyarakat di Desa Banua Lawas mayoritas pekerjaan sebagai petani yang mana penghasilan tidak menentu dan pajak yang dibayarkan tidak semuanya murah ada juga yang mahal. Meskipun sebagian ekonomi masyarakat stabil namun pasti ada saja masyarakat yang kesulitan dalam membayar pajak karena faktor ekonomi.

c. Kesadaran masyarakat

Dari hasil wawancara dan observasi faktor penyebabnya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat karena sebagai masyarakat di Desa Banua Lawas tingkat pendidikan masih rendah hanya sekiti yang berpendidikan tinggi, masyarakat yang berpendidikan tinggi pasti paham dan sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan

2. Faktor pendukung

Dari hasil wawancara dan observasi faktor pendukung yaitu kesempatan yang diberikan cukup baik sudah membagikan SPPT ke rumah-rumah dan memberikan hadiah berupa undian bagi masyarakat yang cepat membayar pajak bumi dan bangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong maka dapat disimpulkan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang kurang baik yaitu mendapatkan informasi sangat kurang yang mana wajib pajak masih kekurangan informasi dan sosialisasi yang dilakukan masih tidak tepat sasaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberian informasi di spanduk pun tidak terlihat, sikap kurang baik terlihat dari pencapaian pajak masih rendah karena kesadaran

masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang padahal sudah dikenakan denda namun karena tidak ada petugas pengawasan sehingga kesadaran wajib pajak kurang, tingkat ekonomi juga masih kurang tentu penghasilan wajib pajak adalah salah satu kunci rasa keinginan masyarakat ikut berpartisipasi, interaksi dan komunikasi juga kurang baik terlihat dari interaksi dari instansi terkait masih tidak ada seperti tidak adanya petugas pemungutan pajak langsung dan tidak adanya petugas pendataan ulang objek pajak serta komunikasi yang dilakukan juga masih kurang yang membuat partisipasi masyarakat masih rendah, persepsi terhadap program juga kurang baik terlihat masih banyak masyarakat yang berpersepsi pajak tidak terlalu penting untuk dibayarkan dikarenakan masyarakat masih kekurangan informasi yang diberikan, inisiatif dari masyarakat juga kurang baik hanya 22% masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun yang cukup baik yaitu kesempatan untuk berpartisipasi dari instansi terkait yang membagikan SPPT ke rumah-rumah. Faktor Penghambat *Satu* Sosialisasi masih kurangnya pemberian informasi kemasyarakat baik secara langsung ataupun sosialisasi yang dilakukan masih tidak tepat sasaran serta tidak ada pemberian informasi berupa spanduk. *Dua* Tingkat Ekonomi Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi penghasilan masyarakat semakin besar juga keinginan masyarakat ikut berpartisipasi. Di karenakan kurangnya kemampuan masyarakat membayar meskipun sebagian ekonomi masyarakat stabil namun tidak menutup kemungkinan pasti ada saja masyarakat yang kesulitan dalam membayar pajak karena tingkat ekonomi mereka. *Tiga* Kesadaran Masyarakat Masyarakat berpartisipasi kecuali ada keperluan mendesak saja dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak karena informasi tentang pentingnya membayar pajak serta masih rendahnya tingkat di Desa Banua Lawas yang mengakibatkan tidak mengetahui bahwa membayar pajak ini untuk pembangunan desa. Adapun Faktor Pendukung yaitu Kesempatan Yang Diberikan, Kesempatan yang diberikan cukup baik sudah membagikan SPPT ke masyarakat dan memberikan hadiah berupa undian bagi masyarakat yang cepat membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) ‘Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah’, *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) ‘Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) ‘Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Fiantika, Feny Rita, et al, (2022) “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Nur, Muhammad, et al, (2023) “*Pelestarian Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat*”t. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media
- Sanggara, Sahya, (2015) “*Metode Penelitian Administrasi*”. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sihombing, Sotarduga dan Sibagariang, Susy Alestriasni, (2020). “*Perpajakan Teori dan Aplikasi*”. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Sugiyono, (2021) “*Metode Penelitian Administrasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (edisi revisi)*”. Bandung: Alfabeta
- Theresia, Aprillia, et al. (2015) “*Pembangunan Berbasis Masyarakat*”. Bandung: CV Alfabet